



# GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)

**Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform  
NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024**

## PERNYATAAN SIKAP RESMI DPP GHARIS

Nomor: 043/SP-DPP/GHARIS/VI/2026

### TENTANG:

**MERESPONS MOMENTUM KOMITMEN FISKAL-HUKUM PRESIDEN PRABOWO  
SUBIANTO DALAM MEMPERKUAT INSTANSI PENEGAK HUKUM DAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

### MUQADDIMAH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Landasan pergerakan Gerakan Hak Asasi Dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) secara filosofis berakar pada pemenuhan hak-hak asasi sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Kami meyakini bahwa setiap individu berhak untuk hidup dalam kesejahteraan yang terjamin oleh hukum.

Dalam konteks bernegara, tindak pidana korupsi adalah bentuk pelanggaran HAM struktural yang secara langsung merenggut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan hukum demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat merupakan amanat konstitusi organisasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar.

### MOMENTUM FISKAL DAN REFORMASI STRUKTUR HUKUM

Pernyataan terbuka Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari Kamis, 4 Juni 2026, yang menegaskan kesiapan negara untuk memenuhi berapapun kebutuhan anggaran instansi penegak hukum (KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri) dengan klausul "*Berapa kau butuh, saya [siapkan]*" merupakan sebuah Momentum Emas Fiskal-Hukum yang harus dikunci oleh elemen masyarakat sipil.

Secara akademis dan teoritis, lemahnya penegakan hukum di Indonesia sering kali berlindung di balik keterbatasan operasional dan minimnya kesejahteraan aparat. Hambatan finansial ini kerap dieksploitasi oleh kekuatan oligarki untuk mengintervensi independensi hukum melalui praktik suap. Dengan adanya jaminan pemenuhan anggaran tanpa batas dari eksekutif, maka dinding pemisah antara aparat dan kemandirian hukum secara substantif telah diruntuhkan. Mulai hari ini, tidak ada lagi alasan logis maupun teknis bagi instansi penegak hukum untuk bertindak lemah, mandul, atau tebang pilih dalam memberantas korupsi.

Merespons hal tersebut secara kilat di hari yang sama dari pusat pergerakan kami di Ciputat, Tangerang Selatan, DPP GHARIS menilai bahwa hilangnya kendala finansial wajib dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas yang berlipat ganda. Sesuai dengan fungsi organisasi dalam Pasal 7 Ayat 3 Anggaran Dasar GHARIS, kami mendorong reformasi kebijakan publik yang



# GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)

**Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform  
NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024**

pro-rakyat dan berkeadilan. Penyediaan anggaran besar ini harus diletakkan dalam koridor regulasi keuangan negara yang ketat dan diaudit secara transparan, agar niat baik Presiden tidak bergeser menjadi ruang penyalahgunaan wewenang baru (*abuse of power*) di internal aparat hukum.

## MANIFESTO DAN KILAS BALIK

Komitmen DPP GHARIS dalam mengawal momentum ini sejalan dengan manifesto penegakan hukum yang secara konsisten dilemparkan ke publik oleh Ketua Umum DPP GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, S.Hum, sejak awal pendirian organisasi pada 28 November 2023. Sebagaimana draf gerakan yang telah kami rumuskan, GHARIS menegaskan kembali dua prinsip utama yang harus segera diadopsi oleh negara:

Pertama, penguatan instansi hukum wajib berjalan beriringan dengan independensi mutlak dari segala bentuk intervensi kekuasaan. Tanpa adanya integritas budaya hukum (*legal culture*), anggaran sebesar apa pun hanya akan melahirkan tirani baru yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Kedua, negara harus segera merombak total sistem pengawasan internal (*internal whistleblowing system*) serta memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Ayat 7 Anggaran Dasar GHARIS. Perlindungan hukum bagi warga sipil yang berani membongkar praktik maladministrasi dan korupsi adalah indikator utama bahwa penguatan hukum ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar penguatan sektoral kelembagaan.

## PERNYATAAN SIKAP & REKOMENDASI FORMAL

Atas dasar kajian substantif di atas, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GHARIS menyatakan sikap:

1. **MENDUKUNG PENUH DAN MENGUNCI** visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat instansi hukum, dengan penegasan bahwa pemenuhan anggaran maksimal wajib menghasilkan kinerja pemberantasan korupsi yang agresif, radikal, dan berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*).
2. **MENDESAK** pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait untuk segera menyusun indikator capaian kinerja yang transparan dan dapat diakses publik, serta memastikan seluruh proses penganggaran ini tunduk pada regulasi hukum positif demi menjaga checks and balances.
3. **MENGINSTRUKSIKAN** kepada seluruh lini kepengurusan GHARIS, mulai dari Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), hingga Pimpinan Ranting (PR) di seluruh Indonesia untuk bergerak aktif sebagai elemen pengawas sosial (*social control*), memastikan bahwa penguatan penegakan hukum ini berdampak nyata hingga ke tingkat akar rumput di daerah.

Pernyataan sikap ini dirumuskan dengan integritas akademik yang utuh, bernafaskan independensi organisasi, demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan bermartabat.



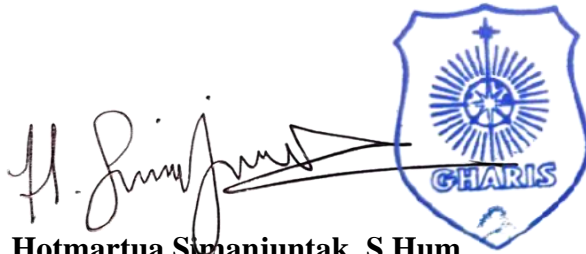
**GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI  
INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)**  
**Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform**  
**NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024**

---

Disahkan di : Ciputat, Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 4 Juni 2026

**GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA**



**Hotmartua Simanjuntak. S.Hum**  
Ketua Umum